

BAB II

TINJAUAN UMUM

TEMPAT KEGIATAN MAGANG

2.1 Sejarah Instansi

Sangat terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015, berdirinya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Karhutla adalah salah satu bencana global terbesar yang melanda hampir seluruh Asia Tenggara. Dari Juni hingga Oktober 2015, bencana ini terjadi di banyak tempat, terutama di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, kecuali Ibu Kota Jakarta, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau, banyak pulau lain di Indonesia juga terkena dampak karhutla. Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua adalah provinsi yang paling parah terkena dampak karhutla. Di Indonesia, 2,61 juta hektar lahan terbakar, menyebabkan sekitar 24 korban jiwa (Widhi K, 2015).

Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi. Lahan gambut, yang memiliki kapasitas untuk menyimpan karbon hingga tiga belas kali lipat dari bobotnya sendiri, adalah rumah bagi hutan. Kebakaran ini terutama disebabkan oleh perusahaan besar yang membakar hutan dan lahan secara ilegal untuk membuka perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Meskipun metode ini dianggap cepat dan mudah, pemerintah melarangnya karena ada undang-undang (Kompasiana, 2022). El Niño menyebabkan kemarau yang lama dan penurunan curah hujan, yang memperburuk keadaan, mengeringkan lahan gambut, dan membuat pemadaman api menjadi lebih sulit (Katadata.com, 2023). Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2,61 juta hektar telah terbakar oleh kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, dengan 869.754 hektar di antaranya adalah lahan gambut (Khusnulhatimah, 2020).

Kebakaran pada lahan gambut memicu krisis kabut asap yang berdampak luas pada berbagai sektor. Dari sisi lingkungan, kebakaran ini menghancurkan habitat satwa liar, termasuk spesies yang dilindungi seperti orangutan dan harimau Sumatra. Dampak kesehatan meliputi penyakit seperti ISPA, asma, dan iritasi, bahkan menyebabkan 24 orang meninggal (Khusnulhatimah, 2020). Sektor pendidikan terdampak akibat liburunya aktivitas belajar-mengajar, sementara

kerugian ekonomi mencapai Rp5,4 triliun di sektor pariwisata, Rp540 miliar di pendidikan, dan Rp58,4 triliun di lingkungan hidup (KhusnulKhatimah, 2020). Kabut asap tebal juga menyebar ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, menimbulkan konsekuensi yang signifikan di seluruh dunia.

Melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2016, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki 2 juta hektar lahan gambut yang rusak di tujuh provinsi yang sangat penting, termasuk Riau dan Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kebakaran serupa di masa depan dan memulihkan peran penting gambut sebagai penyimpan karbon.

Perpres Nomor 120 Tahun 2020 memperluas tanggung jawab BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Selain memulihkan gambut, BRGM juga ditugaskan untuk memperbaiki sekitar 600 ribu hektar mangrove di wilayah pesisir hingga tahun 2024. Fokus langkah ini adalah restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, yang memperkuat komitmen pemerintah terhadap mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus menunjukkan peran Indonesia dalam menangani krisis lingkungan dunia.



Gambar 2.1 Logo BRGM
Sumber: brgm.go.id

Setiap warna dari logo BRGM memiliki makna dan merepresentasikan terkait segala hal yang berkaitan dengan gambut dan mangrove. Berikut penjelasannya:

1. Latar belakang warna hijau muda melambangkan kesejahteraan dan kehidupan bagi masyarakat yang berada dalam ekosistem gambut dan mangrove.

2. Bidang melengkung warna hijau melambangkan tutupan vegetasi di atas ekosistem gambut yang mencerminkan daya dukung, produktivitas dan peranan ekosistem gambut dalam sistem penyangga kehidupan.
3. Bidang warna hijau berjumlah 9 membentuk daun melambangkan 9 provinsi prioritas percepatan rehabilitasi mangrove.
4. Bidang warna coklat berjumlah 7 melambangkan 7 provinsi sebagai provinsi prioritas restorasi gambut.
5. Bidang berwarna biru melambangkan laut sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6. Tulisan yang dibuat oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menunjukkan bahwa BRGM membantu mempercepat proses rehabilitasi dan restorasi gambut serta bekerja sama dengan stakeholder lainnya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Visi BRGM

Mewujudkan kondisi ekosistem gambut dan mangrove yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berbasis gotong royong adalah tujuan dari BRGM.

2.1.2 Misi BRGM

Adapun misi BRGM adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan mengembangkan pemanfaatan gambut dan mangrove yang berkelanjutan.
2. Memfasilitasi pemulihan gambut dan mangrove yang terdegradasi
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam restorasi dan rehabilitasi gambut dan mangrove.
4. Memfasilitasi inisiatif riset yang mendukung pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

2.1.3 Fungsi BRGM

Adapun fungsi BRGM sebagai berikut.

1. Pelaksanaan restorasi gambut.
2. Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan restorasi gambut.
3. Pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya.
4. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut.
5. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut.
6. Pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut.
7. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
8. Pemberian dukungan administrasi.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2.1.4 Prestasi BRGM

Selama 8 (delapan) tahun terbentuk sebagai Lembaga non-struktural yang bertanggungjawab langsung dengan Presiden. BRGM telah memiliki banyak prestasi dan penghargaan diantaranya sebagai berikut:

1. BRGM dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif dalam kategori Lembaga Non-Struktural pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022
2. BRGM dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif dalam kategori Lembaga Non-Struktural dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 oleh Pusat Komisi Informasi.
3. BRGM diakui sebagai Juara 2 Booth Terbaik pada Acara Pekan Keanekaragaman Hayati, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari 15 hingga 17 Mei 2024.
4. BRGM juga menerima Bhumandala Rajata (Medali Perak) dalam Anugerah Bhumandala Award 2024

2. Sekretaris

Sekretaris BRGM adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mendukung operasional lembaga dengan memastikan administrasi, keuangan, dan kepegawaian organisasi berjalan lancar. Sekretaris badan bertanggung jawab atas koordinasi Deputi dan Pokja serta pengelolaan informasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan kegiatan lembaga. Selain itu, Sekretaris juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik antara BRGM dengan pihak eksternal melalui komunikasi yang efektif, baik dalam hal publikasi program maupun penyampaian kebijakan. Sekretaris bekerja langsung di bawah Kepala Badan dan sangat penting untuk memastikan setiap unit BRGM berjalan sesuai prosedur. Secara struktur, pokja-pokja berikut dipimpin oleh sekretaris.

a. Pokja Program dan Anggaran

Pokja ini bertanggung jawab atas perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan anggaran di BRGM. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap program yang dirancang memiliki alokasi anggaran yang sesuai serta diimplementasikan secara efisien. Pokja ini juga bertugas dalam evaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga. Pokja ini memiliki dua Subpokja:

- 1) Subpokja Penyusunan Program dan Anggaran
Bertugas menyusun rencana anggaran untuk mendukung program restorasi gambut dan mangrove serta memastikan program-program tersebut dibiayai dengan benar.
- 2) Subpokja Evaluasi Anggaran
Bertugas memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi program.

b. Pokja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Pokja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (KHH) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program BRGM sesuai dengan regulasi hukum dan membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional. KHH juga bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan publik untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Terdapat tiga subpokja di KHH, yaitu

1) Subpokja Kerjasama

Tanggung jawab untuk membangun dan mengelola kolaborasi dengan berbagai pihak berwenang, termasuk lembaga internasional, pemerintah regional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

2) Subpokja Hukum

Bertugas mengkaji aspek legal dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan BRGM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Subpokja Humas

Bertugas mengelola komunikasi publik dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi terkait program-program BRGM melalui berbagai media agar dapat dipahami oleh masyarakat luas. Humas di BRGM terbagai atas dua, yakni media sosial dan jurnalistik. Media sosial berfokus pada pengelolaan media sosial, produksi konten, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang masuk. Jurnalistik sendiri fokusnya untuk membangun dan memelihara *media relations*, penulisan artikel dan siaran pers, media monitoring, dan *contact person* BRGM.

c. Pokja Keuangan

Pokja Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BRGM, memastikan setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta memantau arus kas untuk mendukung kelancaran operasional lembaga. Pokja ini terdiri dari 2 Subpokja, yakni:

1) Subpokja Perbendaharaan

Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan BRGM dan memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan pemerintah.

2) Subpokja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan dan memastikan pencatatan akuntansi dilakukan secara transparan dan akurat.

d. Pokja Umum dan Kepegawaian

Pokja ini bertugas mengelola sumber daya manusia serta administrasi umum di BRGM, termasuk proses rekrutmen, pengembangan kapasitas pegawai, dan pengelolaan fasilitas pendukung lainnya. Terdapat 2 Subpokja pada Pokja ini, yakni:

1) Subpokja Kepegawaian

Bertugas mengelola segala hal terkait pegawai BRGM, termasuk pengelolaan data kepegawaian, kenaikan jabatan, serta pengembangan kompetensi pegawai.

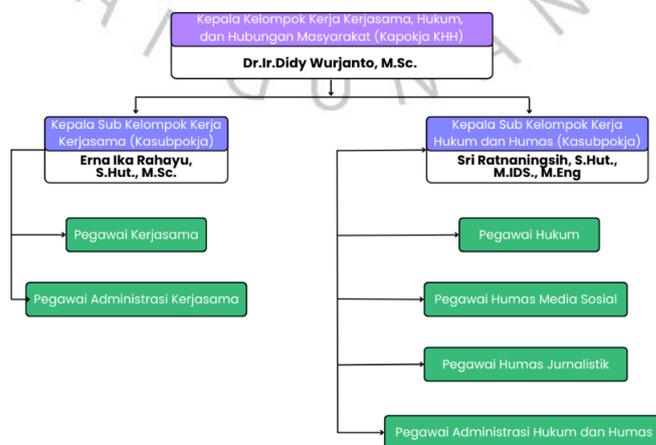
2) Subpokja Umum dan Layanan Pengadaan

Bertugas mengelola kebutuhan logistik, pengadaan barang dan jasa, serta fasilitas umum yang mendukung operasional BRGM.

e. Pokja Pengawasan Internal

Pokja ini berfungsi sebagai auditor internal yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan BRGM berlangsung dengan visi dan misi BRGM. Pokja ini juga melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan implementasi program. Pengawasan Internal hanya memiliki 1 Subpokja, yakni Administrasi Pengawasan Internal, yang bertugas mengelola aspek administratif dari pengawasan internal, termasuk pelaporan dan dokumentasi hasil pengawasan.

2.2.1 Struktur Pokja KHH BRGM



Gambar 2. 3 Struktur Pokja KHH BRGM
Sumber: Dok. Internal BRGM

Selama melaksanakan kegiatan magang MSIB, praktikan mendapatkan posisi sebagai magang *public relations* (Humas). Oleh karena itu, peaktikan ditempatkan di Pokja KHH. Jumlah seluruh pegawai KHH adalah 19 orang, dengan 1 Kapokja, 2 Kasubpokja, dan 16 pegawai. KHH sendiri dikepalai oleh Dr.Ir.Didy Wurjanto, M.Sc., sebagai Kapokja KHH. Seperti pada gambar 2.3, KHH terdiri dari 2 Subpokja, yakni:

1. Subpokja Kerjasama

Kerjasama dikelola oleh Erna Ika Rahayu, S.Hut., M.Sc., sebagai Kasubpokja Kerjasama, dengan 5 pegawai, termasuk 1 yang bertugas menangani administrasi (surat-menyurat dan keuangan) dan 4 lainnya melaksanakan kegiatan teknis. Tugas teknis meliputi pertemuan dengan kedutaan, mengisi materi seminar/webinar, serta penandatanganan kerja sama atau penerimaan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari perusahaan profit.

2. Subpokja Hukum dan Humas

Kasubpokja Hukum dan Humas, Sri Ratnaningsih, S.Hut., M.IDS., M.Eng., memimpin 7 pegawai Hukum dan Humas. Hukum memiliki 2 pegawai yang menyusun draf UU, aturan, dan memantau kegiatan restorasi sesuai hukum dan norma masyarakat. Humas terbagi menjadi Media Sosial dan Jurnalistik. Media Sosial, dengan 4 pegawai, mengelola media sosial, memproduksi konten, dan menjawab pertanyaan. Peran meliputi Sosial Media Specialist, Graphic Designer, Video Editor, dan IT Technician. Jurnalistik, dengan 2 pegawai, fokus pada media relations, penulisan artikel, media monitoring, serta menjadi contact person, dengan peran Photographer, Videographer, dan Journalist. Administrasi Hukum dan Humas, dengan 3 pegawai, menangani surat-menyurat, keuangan, serta membantu Kapokja saat acara.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

BRGM adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan target restorasi gambut seluas 1,2 juta hektar dan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar, tujuan utama BRGM adalah untuk mempercepat pelaksanaan restorasi gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang ditargetkan. Selain itu, BRGM juga berfokus pada percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target. Keberadaan BRGM menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut dan mangrove yang memiliki peran besar dalam mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Kantor pusat BRGM terletak di Jl. Teuku Umar No.17 1, RT.1/RW.1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sementara itu, kantor cabang BRGM lainnya berada di Jl. Cikini Raya No.42, RT.16/RW.2, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam sektor lingkungan, BRGM memiliki peran penting dalam melaksanakan program-program restorasi ekosistem, yang mendukung pemulihan dan kelestarian alam Indonesia.

1. Mepercepat proses restorasi gambut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Untuk restorasi gambut, wilayah kerja BRGM mencakup tujuh provinsi: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
2. Percepat rehabilitasi mangrove di area kerja. Rehabilitasi mangrove dilakukan oleh BRGM di delapan provinsi: Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.